

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	4
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB V PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. OPD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tulang Bawang dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang berpedoman pada RPD 2023-2026.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;

- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini adalah antara lain :

- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyedian Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
			Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyedian Peralatan Rumah Tangga
			Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Kegiatan. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah KabupatenKota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan didasarkan pada sasaran-sasaran. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023. Dinas Perhubungan telah menetapkan sasaran yang akan dicapai, dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Derajat Kejenuhan Jalan	nilai	-	0,40	0,39	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Perairan	Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan	%	-	25	22	Berhasil
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	nilai	58	60	64,66	Sangat Berhasil

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Dinas Perhubungan Tulang Bawang sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Dinas Perhubungan Tulang Bawang sampai dengan tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(3)	(4)	(5)						(9)	(8)	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator kinerja kegiatan Dinas Perhubungan yang tercapai	100 persen	N/A				100 persen		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 persen	N/A				100 persen		
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 laporan	N/A	6 laporan	1 laporan	17	6 laporan	1 laporan	16,67
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	100 persen	N/A				100 persen		
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	124 orang	N/A	31 orang	31 orang	100	31 orang	31 orang	100
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 laporan	N/A	6 laporan	1 laporan	17	4 laporan		
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	84	N/A				81		
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	80 paket	N/A	-	-		80 paket		
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 orang	N/A	-	-				
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	76 persen	N/A				70 persen		
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	N/A	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	44 paket	N/A	10 paket	10 paket	100	7 paket	6 paket	85,71
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	N/A	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	N/A	1 paket	1 paket	100	3 paket	5 paket	166,67
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	4 paket	N/A	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	84 laporan	N/A	20 laporan	20 laporan	100	18 laporan	19 laporan	105,56

2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan	46 persen	N/A				40 persen		
2.15.01.2.06.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	N/A	-	-				
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	N/A				100 persen		
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	10 laporan	83,33
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	91 persen	N/A				83 persen		
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	56 unit	N/A	14 unit	14 unit	100	14 unit	14 unit	100
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit	N/A	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	24 unit	N/A	6 unit	6 unit	100	15 unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	N/A				100 persen		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	86 persen	N/A				80 persen		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	532 unit	N/A	210 unit	210 unit	100			
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4283 unit	N/A	150 unit	150 unit	100	1033 unit	878 unit	85,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	39 persen	N/A				36 persen		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	12500 unit	N/A	2500 unit	2500 unit	100	2500 unit	2500 unit	100
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	35 unit	N/A	8 unit	8 unit	100	8 unit	8 unit	100
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLI	100 persen	N/A				100 persen		
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	48 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	100 persen	N/A				100 persen		
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	52 persen	N/A				50 persen		
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/	48 laporan	N/A	12 laporan		100	12 laporan	12 laporan	33,33

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai, adanya rasionalisasi anggaran serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tulang Bawang, serta berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dengan didukung oleh dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.204.436.700	1.096.753.473	91,06
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5.228.852.256	5.187.184.321	99,20
3	Program Pengelolaan Pelayaran	20.080.000	18.965.000	94,45

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	Belanja Pegawai	3.254.206.264	3.020.655.973	92,82

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp 9.707.575.220 terealisasi sebesar Rp 9.323.558.767 atau 96,04%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.254.206.264 dan terealisasi sebesar Rp 3.020.655.973 atau 92,82%, serta Belanja Langsung sebesar Rp 6.570.608.956 dan terealisasi sebesar Rp 6.397.502.794 atau 97,37%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Perhubungan didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
2. Kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya;
3. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin supir angkutan yang rendah;
4. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang seperti marka, rambu-rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan banyak yang rusak karena kecelakaan;
5. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas;
6. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Tulang Bawang, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru;
7. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
8. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi;

9. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi prioritas bagi pemangku kebijakan;
10. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi /orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional;
11. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
12. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan perairan, karena kurangnya kesadaran para pengguna angkutan terhadap pentingnya keselamatan angkutan perairan serta kurangnya anggaran untuk mengembangkan potensi angkutan perairan di Kabupaten Tulang Bawang.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah serta terhadap capaian program nasional. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 4 tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur bidang Transportasi;
2. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Perhubungan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2024			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.15 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	65			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	65	
2.15 . 01. 2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	100%			Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	100%	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perhubungan)	Kab. Tulang Bawang	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan		Kab. Tulang Bawang	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tulang Bawang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/ bulan		Kab. Tulang Bawang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/ bulan	
2.15 . 01. 2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	72%			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	72%	
2.15 . 01. 2. 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	
2.15 . 01. 2. 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
2.15 . 01. 2. 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 paket		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 paket	
2.15 . 01. 2. 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	20 laporan		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	20 laporan	
2.15 . 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
2.15 . 01. 2. 08 . 02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	
2.15 . 01. 2. 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
2.15 . 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	86%			Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	86%	
2.15 . 01. 2. 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	

2.15 . 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%			Persentase Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	
2.15 . 02. 2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	82%			Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	82%	
2.15 . 02. 2. 02 . 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1050 unit		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1050 unit	
2.15 . 02. 2. 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	37%			Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	37%	
2.15 . 02. 2. 05 . 01	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3000 unit		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3000 unit	
2.15 . 02. 2. 05 . 07	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	
2.15 . 02. 2. 06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	100%			Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	100%	
2.15 . 02. 2. 06 . 04	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	
2.15 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			100%				100%	
2.15 . 03. 2. 07	Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	51%			Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	51%	
2.15 . 03. 2. 07 . 02	Pengendalian Dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan		Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian output serta jumlah target kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, ke wilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 salah satunya adalah **“Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;
2. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPD, mengacu pada RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, , serta dalam rangka mewujudkan

kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 yaitu **“Mengoptimalkan Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, dan Berdaya Saing menuju Tulang Bawang Aman, Mandiri dan Sejahtera”** Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Kondusif dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
2. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha, Investasi serta Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Kampung;
5. Terwujudnya SDM yang berkualitas;
6. Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas;
7. Penataan Ruang dan Pengelolaan SDA yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Tahun 2023, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Derajat Kejenuhan Jalan	0,35
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Perairan	2. Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan	25%
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	3. Nilai/ Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	65

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLA PELAYARAN

a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota

- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah /Kabupaten/Kota

Tabel 3.2 Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.15 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan		65				65	
2.15 . 01. 2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan		100%				100%	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perhubungan)	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Tulang Bawang	12 laporan		APBD		12 laporan	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tulang Bawang	31 orang/ bulan		APBD		31 orang/ bulan	
2.15 . 01. 2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		72%				72%	
2.15 . 01. 2. 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tulang Bawang	8 paket		APBD		8 paket	
2.15 . 01. 2. 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tulang Bawang	1 paket		APBD		1 paket	
2.15 . 01. 2. 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tulang Bawang	3 paket		APBD		3 paket	
2.15 . 01. 2. 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	Kab. Tulang Bawang	20 laporan		APBD		20 laporan	
2.15 . 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%				100%	
2.15 . 01. 2. 08 . 02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tulang Bawang	12 laporan		APBD		12 laporan	
2.15 . 01. 2. 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tulang Bawang	12 laporan		APBD		12 laporan	

2.15 . 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik		86%				86%	
2.15 . 01. 2. 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tulang Bawang	14 unit		APBD		14 unit	
2.15 . 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		100%				100%	
2.15 . 02. 2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi		82%				82%	
2.15 . 02. 2. 02 . 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Tulang Bawang	1050 unit		APBD		1050 unit	
2.15 . 02. 2. 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor		37%				37%	
2.15 . 02. 2. 05 . 01	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Tulang Bawang	3000 unit		APBD		3000 unit	
2.15 . 02. 2. 05 . 07	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Tulang Bawang	9 unit		APBD		9 unit	
2.15 . 02. 2. 06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL		100%				100%	
2.15 . 02. 2. 06 . 04	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	12 laporan		APBD		12 laporan	
2.15 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			100%				100%	
2.15 . 03. 2. 07	Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan		51%				51%	
2.15 . 03. 2. 07 . 02	Pengendalian Dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	12 laporan		APBD		12 laporan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023 – 2026. Rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 mencakup 3 program terdiri 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan yaitu:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.393.364.418	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.130.918.618	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	100 %
Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	3.421.443.618	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	709.475.000	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.187.900	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	72 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.644.200	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	546.500	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	9.979.200	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.018.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.830.800	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.070.800	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.760.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.427.100	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	86 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.427.100	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 kendaraan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.262.500.000	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	4.130.000.000	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	82 %
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.130.000.000	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	1050 unit
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.500.000	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	37 %
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57.500.000	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	3000 unit
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	9 unit
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.000.000	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	100 %
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	60.000.000	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	12 laporan
PROGRAM PENGELOLA PELAYARAN	23.100.000	Persentase pengelolaan pelayaran	100%
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	23.100.000	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	51 %
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah /Kabupaten/Kota	23.100.000	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 laporan

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renja ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh seluruh unsur pada OPD.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2024 dan upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2024 dalam bentuk program dan kegiatan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Drs. A M RI, M.I.P.
NIP. 19650322 198603 1 005